

BAB V

PENUTUP

5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah bahwa kemampuan keuangan daerah yang diukur berdasarkan analisis rasio keuangan yakni :

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, baik daerah tertinggal dan berkembang menunjukkan selama Tahun Anggaran 2015-2019 kinerja Sangat Rendah. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kinerja secara rata-rata untuk daerah berkembang sebesar 9,6% dan daerah tertinggal sebesar 7,28%, Pola hubungannya Instruktif.
- b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tertinggal rata-ratanya adalah 94,2% dan daerah berkembang 92,7%. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat dan propinsi masih sangat dominan dalam ketergantungan keuangan daerah.
- c. Rata-rata Rasio Efektivitas Daerah tertinggal 84,9%, dan daerah berkembang 85,8%, kategori kurang efektif.

- d. Rata-rata efisiensi penggunaan keuangan daerah pada daerah tertinggal 14,6 % dan daerah berkembang 10,8%, kategori Cukup Efisien.
- e. Rasio Keserasian Daerah tertinggal rata-rata belanja langsung (49,04%) dan tidak langsung (50,96%), masih belum seimbang. Daerah berkembang rata-rata belanja langsung (42,89 %) dan rata-rata belanja tidak langsung (57,11%) ini juga menunjukkan belum seimbang. Karena idealnya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung dengan kisaran antara 60% - 90%.
- f. Rata-rata Rasio Pertumbuhan daerah tertinggal 6,12%, dan Rata-rata rasio pertumbuhan pada daerah berkembang 10,53%.

5. 2. Saran

Berdasarkan penarikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis terhadap kemampuan keuangan daerah pada daerah tertinggal dan daerah berkembang di Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut.

- a. Bagi Pemerintah 13 Kabupaten daerah tertinggal dan 9 Kabupaten/Kota daerah berkembang.

1. Agar dapat meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki, melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, serta pemanfaatan aset –aset daerah yang potensial. Agar selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah. Seharusnya juga tidak selalu mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat, agar kedepannya bisa tumbuh menjadi Kabupaten yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

2. Agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien, maka hal penting yang harus diketahui oleh Pemerintah Daerah, baik itu pada daerah tertinggal maupun daerah berkembang, dalam perencanaan penggunaan keuangannya sebisa mungkin merasionalkan belanja sehingga belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum Anggaran Belanja Daerah

diarahkan pada program prioritas, diantaranya pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang di dukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor – sektor produktif lainnya, baik itu di 13 Kabupaten daerah tertinggal maupun 9 Kabupaten/Kota daerah berkembang.

3. Pemerinta Kabupaten daerah tertinggal dan daerah berkembang yang sudah efektif, efisien, serasi dalam penggunaan keuangannya dapat terus menata, meningkatkan dan mengkaji belanja daerah antara sektor yang kurang produktif dan mengalihkan ke sektor yang produktif. Sehingga memiliki peluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, agar dapat berpindah dari kelompok Kabupaten daerah tertinggal dan beralih ke Kabupaten daerah berkembang. Dan atau dari kelompok Kabupaten/Kota daerah berkembang ke kelompok Kabupaten/Kota daerah Mandiri atau Maju.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan berbagai macam rasio, yang bisa menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya dan memperluas lingkup wilayah penelitian dan jangka waktu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, Nunuy Nur. 2010. *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana.
- Apriani, Andina. 2019. Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Riset Ekonomi* Vol. 2 No. 2.
- Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asri, Jatnika. 2016. Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol. 4 No. 2.
- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bayangkara, IBK. 2014. *Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta
- Halim, Abdul dan Muhammad, Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Harahap, Sofyan Syafri . 2008. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi. Aksara.
- Jaenuri. 2016. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Bojonegoro dan Jombang Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.14 No. 1.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

- Mardiasmo. 1999. *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*. Yogyakarta: PAU Studi Ekonomi UGM
- Anonym. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Anonym. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurabiah. 2018. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Akuntansi FEB* Vol. 3 No. 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024
- Putri, Anggun. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Bisnia* Vol. 4 No.3.
- Sedarmayanti. 2003. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Ilham Jaya.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Jurnal Media Riset Akuntansi* Vol. 1 No. 2.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Waoma, Samalua. 2019. Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara. *Riset dan Jurnal Akuntansi* Vol. 3 No.2.